

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

Siti Muslimah, 17120258

Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran bagaimana partai politik golongan karya (GOLKAR) melaksanakan fungsinya sebagai tempat rekrutmen politik dalam mengantarkan bagi setiap masyarakat yang ingin menduduki kursi jabatan pemerintahan maupun sebagai pengurus partai dengan melalui tahapan seleksi dari aspek rekrutmen politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah sekretaris dan bendahara DPD Partai Golkar kota Banjarmasin.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi rekrutmen politik pada PG kota banjarmasin mencakup rekrutmen anggota, rekrutmen pengurus, rekrutmen calon anggota legislatif, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekrutmen anggota dilakukan dengan cara persuasif yang diawali dengan sosialisasi PG kepada masyarakat untuk menampilkan eksistensi partai.

Kata kunci : Rekrutmen politik, partai politik, Partai Golkar

Abstract. The purpose of this study is to describe how the work group political party (GOLKAR) carries out its function as a place for political recruitment in delivering for every community who wants to occupy a government position or as a party administrator by going through the selection stages of the political recruitment aspect. This study uses a qualitative approach, the methods used are interviews, observation and documentation. The informants in this study were the secretary and treasurer of the Golkar Party DPD Banjarmasin.

The results showed that the implementation of political recruitment at PG Banjarmasin included member recruitment, management recruitment, recruitment of legislative candidates, regional head candidates and deputy regional heads. Recruitment of members is carried out in a persuasive manner, beginning with the socialization of PG to the public to show the existence of the party.

Key words : Political recruitment, political party, Golkar Party.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelompok ideologis memiliki peran penting dalam kerangka politik di suatu negara, anggota yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif akan berbicara kepada rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hanya sebagai tempat untuk memenuhi keinginan anggota kader baru dalam menentukan pilihan bersama.

Kelompok ideologis sebagaimana yang kita pahami adalah perkumpulan persekutuan organisasi yang terlibat dengan masalah pemerintahan untuk mencapai tujuan kekuatan politik, di mana kelompok-kelompok ideologis digerakkan oleh orang-orang yang memiliki visi dan misinya sendiri. Berbagai aset politik bersaing untuk mendapatkan peran penting dalam masalah legislatif karena dalam masalah pemerintahan mereka akan mendapatkan aset data, moneter, organisasi, dan inovasi data.

Partisipasi politik merupakan kapasitas prinsip kelompok ideologis dalam menyelesaikan tugasnya sebagai spesialis perantara atau kontak antara warga dan negara di tepi penggambaran publik. Melalui rekrutmen politik, partai politik dapat mendampingi warga yang ingin duduk di kursi pemerintahan, baik pemerintahan (DPR dan DPRD), pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden), dan kepala teritorial. Sehingga tujuan utama sistem berbasis suara pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kelompok-kelompok ideologis juga mampu untuk mengarahkan kader muda yang akan datang untuk menggantikan kerangka kader lama. rekrutmen politik telah diarahkan pada Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang kelompok politik yang menyatakan bahwa salah satu unsur kelompok ideologis adalah sebagai cara rekrutmen politik selama mengisi situasi politik melalui instrumen yang

mempertimbangkan keseragaman, orientasi dan kesetaraan.

Dalam kelompok ideologis mereka akan mencari kerangka kerja yang memiliki kapasitas kejujuran tinggi dan berpotensi dalam masalah pemerintahan. Sebagaimana terindikasi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Putusan disebutkan bahwa pemilihan anggota calon kader baru dan ketua seperti kepala provinsi dilakukan dengan cara voting atau terbuka sesuai dengan pasal-pasal afiliasi, tata cara dan pedoman dalam rapat. Sekalipun demikian, penjelasannya adalah dengan alasan bahwa otoritas publik mulai banyak di isi oleh kader muda, dimana mereka tidak memiliki pengalaman dan penguasaan dalam masalah pemerintahan. Kelompok ideologis harus secara konsisten mengingat bahwa rekrutmen di luar wawasan mereka dalam masalah pemerintan tidak akan berdaya menghadapi bahaya dalam dunia politik. Misalnya, penilaian kerangka lain yang filosofinya tidak sesuai dengan asosiasi kelompok ideologis yang bersangkutan. Realitas ini sudah baanyak mengisi tanah air pada masa kini. Cukup dengan menjaga ketenaran, keunggulan dan ketampanan serta bersaing di ranah masalah pemerintahan. Kontes ini pada akhirnya akan mendorong situasi politik sebagai penggambaran anggota di kemudian hari. Kenyataannya, popularitas itu baik-baik saja, tetapi ingatlah pekerjaan dan kemampuan pemulihan dalam kelompok ideologis, karena seandainya anda menjalankan masalah legislatif saat ini maka dampaknya tidak hanya untuk warga masyarakat yang hidup sekarang tetapi juga akan dijiwai untuk kader kerja masa depan. Dengan demikian, unit-unit dalam kelompok ideologis harus mampu bertahan hidup, yang mana harus memiliki kejujuran, cakap, solid, dan berkualitas. Partai politik Golongan Karya (GOLKAR) Indonesia merupakan salah satu partai yang cukup banyak mempunyai massa. Salah satu modelnya adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Golkar saat ini masih solid dalam perolehan kursi terbanyak dibandingkan dengan partai lain, berbeda dalam keputusan politik 2019 perebutan kursi calon anggota DPRD di Wilayah Kalimantan Selatan. Berdasarkan wasiat perolehan suara di tingkat umum yang ditetapkan KPU Kalimantan Selatan, Golkar bisa merebut

lebih dari 14 kursi DPRD Kalimantan Selatan periode 2019-2024 dari tujuh daerah terpilih yang meraih lebih dari 55 kursi otoritatif balapan DPRD pada 17 April 2019. Untuk lebih jelas, dapat dilihat dari tabel 1 yang disajikan berikut ini.

2. Tinjauan Pustaka

Rekrutmen Politik

Pendaftaran adalah perkembangan siklus dalam pengakuan individu baru dalam suatu asosiasi atau organisasi atau asosiasi. Kehadiran pendaftaran diandalkan untuk memiliki opsi memperoleh angkatan kerja yang berkualitas. Menurut Dunnette (1998: 401) hipotesis pendaftaran terdiri dari tiga hal yaitu faktor ukur, faktor bebas dan faktor lingkungan. Ketiga faktor ini akan saling mempengaruhi dari siklus pendaftaran. Variabel siklus adalah sistem dalam ilmu otak atau instrumen alam yang dianggap menentukan hasil dari teknik pendaftaran yang berbeda. Variabel otonom adalah garis besar latihan pendaftaran. Variabel reliabel adalah efek samping dari interaksi pendaftaran.

Adapun proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

- a. Participan, adalah sekutu yang solid dengan keandalan tinggi untuk pertemuan sehingga mereka dapat dipilih untuk memiliki posisi vital
- b. Compartmentalization, adalah siklus rekrutmen yang bergantung pada landasan instruktif dan perjumpaan hierarkis individu atau latihan sosial-politik.
- c. Immediate survival, tepatnya interaksi pendaftaran dilakukan oleh otoritas ketua pengumpul tanpa fokus pada kapasitas individu yang dipilih
- d. Civil service reform, merupakan siklus pendaftaran yang bergantung pada kapasitas dan ketabahan pesaing sehingga ia bisa mendapatkan posisi yang lebih signifikan atau lebih tinggi.

Jalur-jalur Politik

Dalam pendaftaran politik juga terdapat istilah jalur politik yang perlu kita sadari secara luas dalam pemeriksaannya, antara lain:

- a. Cara aliansi atau perintis perkumpulan, menyiratkan bahwa aliansi partai adalah bagian utama dalam pendaftaran politik dengan alasan

bahwa sebagian besar pengaturan dan pengaturan politik diterima dari efek sampingan dari aliansi antara partai-partai yang mengambil bagian dalam lingkaran politik.

- b. Cara pendaftaran tergantung pada kapasitas kelompok atau individu, menyiratkan bahwa pendaftaran akan menjadi model yang pasti. Sejauh kekuatan, kemampuan yang ada di arena publik lugas.
- c. Cara pendaftarannya tergantung pada pemulihan, yang menyiratkan bahwa setiap kelompok perkumpulan harus memilih dan menyiapkan individu-individunya yang dianggap cakap dan terampil dalam mendapatkan posisi politik tingkat yang tidak dapat disangkal dan dapat membawa kelompok ideologisnya sehingga berdampak pada masyarakat.
- d. Cara pendaftaran politik tergantung pada ikatan khusus, yang berarti penyerahan kekuatan segera oleh perintis. Misalnya, tuan menyerahkan kapasitasnya kepada keluarga kekaisarannya dan kepala klan yang memberikan situasinya kepada anaknya untuk menggantikannya menjadi kepala klan. Kejayaan ini sering terjadi di masa lalu dan disebut sebagai "kerangka politik monarki". Bagaimanapun, kekuatan ini hanya ada di dalam keluarga dan tidak bisa dihindari atau miring.

Mekanisme Rekrutmen Politik

- a. Rekrutmen terbuka, dimana kebutuhan dan sistem pengenalan karakter dapat diketahui secara luas. Strategi ini memberikan kesempatan kepada individu untuk melihat dan mengevaluasi kapasitas tip top politik mereka. Keuntungan yang wajar dari pendaftaran terbuka adalah instrumennya adalah mayoritas, tingkat persaingan politik sangat tinggi dan daerah akan benar-benar ingin memilih perintis yang benar-benar mereka butuhkan, tingkat tanggung jawab perintis tinggi, membawa Memunculkan berbagai perintis yang berbasis suara dan memiliki nilai kejujuran yang dekat dengan rumah
- b. Rekrutmen Tutup ,daripada pendaftaran terbuka, metodenya benar-benar tertutup. Penugasan tidak bisa begitu saja diketahui oleh orang-orang pada umumnya, karena pertemuan ini berasal dari kelompok ideologis itu sendiri. Strategi ini menutup peluang bagi masyarakat umum untuk mengetahui dan kapasitas daerah setempat untuk mensurvei kapasitas individu pengumpul.

Model dan Seleksi Politik

Model rekrutmen politik dan tekad politik juga digambarkan oleh Philip Althop dan Michael Surge dalam (Rochmawaty: 2017), membaginya menjadi tujuh model:

- a. Seleksi melalui ujian dan pelatihan, model ini merupakan model tipikal, umumnya dilakukan untuk mengisi posisi regulator dan otoritatif
- b. Seleksi melalui penyortiran, model ini diselesaikan dengan pemilihan yang terbaik. Model ini digunakan untuk membentengi situasi para pelopor politikMelalui perebutan kekuasaan, model ini biasanya digunakan dengan memanfaatkan atau merusak kebrutalanrotasi, memiliki tujuan untuk mencegah penguasaan posisi dan pertemuan dalam kekuasaan, sehingga ada persyaratan untuk perubahan posisi politik yang intermiten.
- c. Petronag, yang menyiratkan tempat yang dapat dibeli secara efektif dengan anggota keluarga terdekat. Model ini mencakup pembayaran dan kekotoran batin
- d. Koopsi, yang berarti memasukkan individu atau individu baru untuk membuat renungan-renungan yang inovatif agar dapat ikut terlibat dengan visi dan misi yang menjadi fokusnya. Model ini diselesaikan dengan cara di mana perintis yang ada dapat membantu pendaftaran jenis perintis tertentuTekad dengan membesarkan pionir bersama. Model ini merupakan pertahanan kasar bagi prinsip luhur.

Faktor-faktor Rekrutmen Politik

Czudnowski dalam (Tricahyono: 2015), yaitu:

- a. *Social*, faktor ini diidentifikasi dengan dampak dari status sosial dan keuangan keluarga, dimana pelamar kelas dunia dibesarkan
- b. *Poltical socialization*, adalah interaksi yang membuat seseorang mengenal usaha-usaha yang harus dilakukan oleh suatu jabatan politik.
- c. *Initial political activity*, faktor ini menunjukkan tindakan atau pengalaman politik
- d. *Apprentional variabel*, faktor ini menunjukkan siklus pemagangan dari pesaing teratas ke elit yang berbeda, yang saat ini memiliki tempat yang difokuskan oleh pesaing kelas dunia.
- e. *Occupatial variabel*, pesaing utama dilihat dari pertemuan mereka di perusahaan konvensional

yang mungkin tidak dapat diidentifikasi dengan masalah pemerintah tentang batasan ilmiah dalam sifat pekerjaan mereka.

- f. *motivations*, individu akan terbujuk untuk menjadi dinamis dalam latihan politik karena dua hal, yaitu spesifik harapan dan arahnya terhadap isu-isu yang berpusat pada kebijakan.

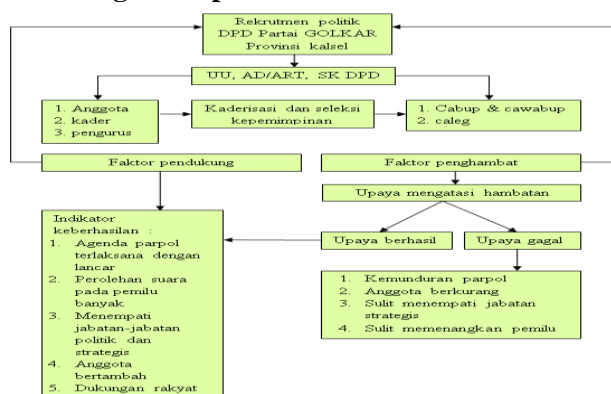
Pengertian Implementasi

Menurut Oktasari (2015: 1340) eksekusi berasal dari bahasa Inggris untuk melaksanakan yang artinya melaksanakan. Eksekusi adalah pengaturan cara untuk menyelesaikan sesuatu yang berdampak atau berdampak pada sesuatu. Sesuatu yang dilakukan untuk memberikan pengaruh atau hasil tersebut dapat berupa undang-undang, undang-undang tidak resmi, pilihan hukum, dan pendekatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam keberadaan negara.

Pengertian Partai Politik

Selain itu, menurut Miriam Budiardjo (2002: 3) masalah pemerintahan adalah setiap latihan yang dilakukan dalam kerangka politik atau negara yang diidentifikasi dengan cara untuk menentukan tujuan dari kerangka tersebut, terlepas dari bagaimana memahami tujuan tersebut.

Kerangka Berpikir



3. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini maka peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab dan mencari pemecahan masalah.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Banjarmasin Tahun 2020

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu cabang Dewan Pimpinan Daerah partai Golkar (DPD-PG) di jl. HKSAN no.8 Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan (70125).

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pemngamatan lapangan.

Instrumen Penelitian

Tehnik penelitian data yang akan peneliti gunakan adalah Pemilihan informan, Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Rekrutmen Anggota dan Kader DPD Partai GOLKAR Kota Banjarmasin

Keanggotaan DPD-PG di kota Banjarmasin merupakan anggota lama yang berasal dari anggota DPD-PG, DPD-PG juga melakukan rekrutmen terhadap masyarakat untuk menjadi anggota baru. Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader DPD-PG tentunya memiliki landasan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan sekretaris DPD-PG kota Banjarmasin masa bakti 2020-2025 yaitu Khalikin Nor, landasan hukum rekrutmen anggota dan kader adalah sebagai berikut.

“Pelaksanaan rekrutmen anggota dan kader DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam partai, yaitu AD/ART DPD Partai golkar” (wawancara, 28 Juni 2021).

Pelaksanaan rekrutmen anggota baru menjadi tanggungjawab bersama seluruh anggota PDP-PG, hal ini sesuai hasil wawancara dengan Khalikin Nor sebagai berikut.

“Seluruh Pengurus Partai GOLKAR, Fraksi, Organisasi Sayap, Ormas atau Hasta Karya yang dimiliki oleh GOLKAR dalam pelaksanaan rekrutmen politik anggota baru.” (wawancara, 28 Juni 2021).

Cara yang dilakukan oleh DPD-PG Kota Banjarmasin dalam merekrut anggota baru lebih

bersifat ajakan persuasi, sebagaimana dikemukakan oleh sekretaris DPD-PG Khalikin Nor sebagai berikut.

“partai Golkar melakukan rekrutmen anggota baru dengan cara persuasif dan Sosialisasi dalam rangka rekrutmen politik Partai Golkar yang biasa dilakukan secara langsung dalam bentuk kerja-kerja Kepartaian, Program Kerja, sosial kemasyarakatan, keagamaan dll, tentu juga melalui perwakilan kader partai Golkar yang menduduki jabatan Legislatif maupun eksekutif”. (wawancara, 28 Juni 2021).

Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan mendapat perhatian dari masyarakat. Ada beberapa upaya Partai Golkar dalam mendekati masyarakat sesuai dikemukakan oleh Khalikin Nor sebagai berikut.

“Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan cara yang variatif tergantung pada kondisi masyarakat dan wilayahnya. Sebagai contohnya Partai Golkar melakukan pengobatan massal gratis bagi masyarakat, ikut serta dalam kegiatan keagamaan dan bakti sosial di wilayah yang membutuhkan”. (wawancara, 28 Juni 2021).

Sosialisasi kepada masyarakat oleh Partai Golkar lebih terasa ketika menjelang Pemilu. Sosialisasi ini mempunyai tujuan mendapat dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar. Berikut ini pemaparan dari Erosa Yuni Pristianto sebagai Bendahara Partai Golkar mengenai salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Golkar.

“Menjelang pemilu, biasanya seluruh kader diintruksikan untuk mendekati masyarakat sehingga mendapat dukungan suara. Caranya bermacam-macam tergantung masyarakatnya. Kalau yang saya lakukan sebagai Bendahara di Partai Golkar di wilayah saya, salah satunya dengan mendekati pemuda lewat karang taruna. Mereka butuh apa ya saya usulkan ke DPD Partai Golkar untuk mendapat tindak lanjut. Contohnya pemuda di desa saya gemar sepak bola, ya kami menyumbang bola dan perbaikan lapangan. Tidak hanya membantu dana saja, tetapi ya saya datang kalau ada rapat-rapat karang taruna. Jika sosialisasi berhasil dengan baik, mungkin warga ada yang berminat mendaftarkan diri ke Partai Golkar, tidak hanya sebagai simpatisan saja atau

hanya mencoblos Partai Golkar saja” (wawancara, 28 Juni 2021).

Implementasi rekrutmen anggota baru Partai Golkar juga tergantung pada kualitas kader dan tokoh Partai Golkar. Jika kader dan tokoh Partai Golkar dinilai baik di mata masyarakat, maka masyarakat akan tertarik untuk ikut bergabung dengan Partai Golkar, lain halnya jika kader dan Partai Golkar buruk, masyarakat tidak akan tertarik dengan Partai Golkar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Erosa Yuni Pristianto sebagai berikut.

“Sebagai bendahara, saya harus bisa membaaur dengan masyarakat dan menunjukkan perilaku yang baik di masyarakat. Contohnya jika ada kerja bakti di lingkungan ya harus ikut. Ada undangan rapat, pengajian ya menghadiri. Saya juga harus aktif di masyarakat. Jadi pandangan masyarakat jika Partai Golkar partainya peminum, atau partai yang kasar dapat diperbaiki dengan sikap terpuji kader-kader Partai Golkar di masyarakat. Selain kader, tokoh-tokoh Partai Golkar ditingkat pusat sampai daerah juga sangat mempengaruhi minat warga. Kalau figur-figur Partai Golkar yang ada di pusat rukun, bekerja dengan baik ya warga akan tertarik masuk Partai Golkar, lain halnya jika kader PDIP diberitakan di Televisi atau di koran kena kasus ya warga tidak akan tertarik pada Partai Golkar bahkan kecewa terhadap Partai Golkar” (wawancara, 28 Juni 2021).

Anggaran Dasar (AD)-PG pasal 13 menyebutkan bahwa anggota partai adalah calon anggota yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan anggota. Mengenai persyaratan anggota partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah sebagai berikut, Warga Negara Indonesia; Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah; Menerima Doktrin, mengucapkan Ikrar, bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan Partai lainnya; Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

Khalikin Nor sebagai sekretaris DP-PG, dalam wawancara dengan peneliti memaparkan tahapan untuk menjadi anggota Partai Golkar adalah sebagai berikut.

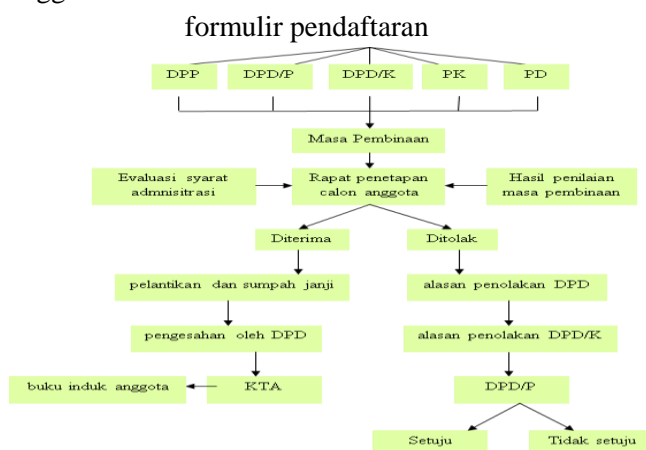
“Tahap menjadi anggota partai dimulai dengan calon anggota mendaftarkan diri sebagai anggota partai melalui jenjang struktural yang ada seperti DPP, DPD/Provinsi, DPD/kabupaten, PK

(Pimpinan Kecamatan) dan PD (Pimpinan Kelurahan), dengan mengisi formulir pendaftaran, kemudian diusulkan untuk diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan partai” (wawancara, 28 Juni 2021).

Sebelum mendapatkan KTA, calon anggota partai harus melalui masa pembinaan. Berdasarkan wawancara dengan Khalikin Nor sebagai berikut. “Masa pembinaan dilakukan selama 6 bulan dengan cara pengurus partai setempat memantau aktivitas calon anggota baru tersebut, apakah mereka taat dengan garis partai. selama 6 bulan itu, setiap anggota diharuskan merekrut sekurangnya 1 (satu) anggota baru. Individu yang telah mendaftar, saat mengembalikan formulir pendaftaran akan mendapat materi tentang seluk beluk Partai Golkar, AD/ART dan sharing langsung dengan kader/pengurus partai dijenjang struktural ia mendaftarkan diri” (wawan).

Pada masa pembinaan, calon anggota dinilai apakah layak menjadi anggota Partai Golkar atau tidak. Jika pernah menjadi anggota partai lain, maka harus dapat menunjukkan surat pengunduran diri dari partai lain tersebut. Setelah itu, DPD melakukan rapat penetapan calon anggota, DPD mempertimbangkan antara syarat administratif dengan hasil penilaian selama masa pembinaan. Jika rapat DPD partai memutuskan calon anggota diterima sebagai anggota Partai Golkar, maka sebelum dilantik menjadi anggota wajib mengucapkan sumpah/janji anggota. Pengesahan anggota partai diputuskan oleh DPD, barulah anggota akan mendapatkan KTA dan ditulis dalam buku induk anggota.

Bagan : Mekanisme implementasi rekrutmen anggota DPD-PG



2. Rekrutmen Pengurus DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin

Anggota merupakan bagian yang penting bagi tubuh suatu organisasi, begitu pula bagi organisasi politik seperti partai politik. Berkembang atau mundurnya partai politik juga ditentukan oleh kualitas pengurus partai yang mengelola partai politik tersebut. Setiap jenjang struktural partai memiliki kepengurusan yang terorganisir. Anggota Partai Golkar Kota Banjarmasin berasal dari anggota Partai Golkar sendiri, oleh sebab itu perlu dipersiapkan anggota berkualitas untuk organisasi kepengurusan. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Partai Kota Banjarmasin, Erosa Yuni Pristianto, diperoleh penjelasan mengenai Anggota Partai Golkar sebagai berikut.

“Anggota partai dalam Partai Golkar adalah susunan pengurus partai yang dipilih dan ditetapkan dalam forum resmi partai dengan Surat Ketetapan oleh pengurus partai dua tingkat di atasnya berdasarkan rekomendasi dari pengurus partai satu tingkat di atasnya, kecuali untuk pengurus DPD Provinsi partai ditetapkan dengan SK DPP partai” (wawancara, 28 Juni 2021).

Selanjutnya Erosa Yuni Pristianto, menjelaskan mengenai perekrutan Anggota DPD-PG Kota Banjarmasin sebagai berikut.

“Pergantian pengurus di DPD Partai Golkar Kota Banjarmasin dilaksanakan setiap lima tahun sekali melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) setelah berakhirnya 5 tahun masa kepengurusan. Pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Daerah (MUSDA) oleh DPP Partai Golongan Karya Nomor: Juklak-1/DPP/Golkar/II/2020 Tentang Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan ART pasal 1 tentang keanggotaan” (wawancara, 28 Juni 2021). Pelaksanaan Musda berlandaskan pada Anggaran Rumah Tangga partai pada pasal 1, bahwa pengurus mempunyai wewenang untuk menilai laporan pertanggungjawaban DPD partai, merumuskan kegiatan partai di kabupaten/kota bersangkutan, dan memilih DPD partai yang melaksanakan tugas dan fungsi DPP partai di wilayahnya. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya : Vlii/Munas-X/Golkar/2019. Sesuai pasal 14 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar bahwa pengurus DPD Partai Golkar terdiri Ketua,

Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara. Syarat yang dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus DPD berdasarkan pasal 18 Anggaran Rumah Tangga (ART) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya : VIII/Munas-X/Golkar/syarat menjadi pengurus partai adalah sebagai berikut.

- a. Aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA)
- b. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT);
- c. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
- d. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI;
- e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai;
- f. Lulus Pendidikan dan Latihan Kader Partai GOLKAR.

Cara perekrutan pengurus DPD-PG tingkat Provinsi dimulai dengan memilih ketua DPD. Sedangkan yang dapat dipilih sebagai ketua DPD adalah calon ketua yang namanya diusulkan oleh utusan DPD partai berdasarkan hasil rapat MUSDA pengurus DPD Kabupaten/kota Partai Golkar. Rapat DPD tingkat kabupaten/kota mempunyai wewenang mengusulkan 1 (satu) nama calon ketua DPD partai dimana DPD yang bersangkutan berada, yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan partai. Jika ketua DPD Provinsi telah terpilih, maka ketua terpilih menjadi ketua formatur yang selanjutnya mempunyai wewenang untuk menyusun kepengurusan DPD dibantu oleh anggota formatur yang dipilih dari dan oleh DPD Kabupaten/kota partai. Utusan MUSDA terdiri dari Ketua, Wakil-Wakil Ketua Bidang, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara partai definitif yang ditetapkan dalam MUSDA pengurus DPD tingkat Kabupaten/kota Banjarmasin. Kepengurusan DPD yang telah dibuat kemudian ditetapkan dalam SK DPD-PG provinsi kalimantan selatan nomor : SKEP-010/GOLKAR-KS/IV/2021 tentang pnegesahan revitalisasi dan reposisi komposisi dan personalia dewan pimpinan daerah partai golkar kota banjarmasin masa bakti 2020-2025.

3. Rekrutmen Calon Legislatif oleh DPRD Partai Golkar Kota Banjarmasin

Apabila masing-masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi kualitas anggota dewan khususnya dalam proses rekrutmennya, maka dapat dipastikan partai akan benarbenar teliti dan melakukan banyak pertimbangan terhadap kualitas calon legislatif yang mereka hendak ajukan karena dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan yang juga turut menyeleksi sifatnya hanya sekunder saja, jika persyaratan umum sudah dipenuhi calon maka Komisi Pemilihan Umum tidak ada alasan untuk tidak meloloskannya. Berdasarkan Surat Keputusan DPP-PG Nomor KEP227/Golkar/1/2020 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tahapan penyusunan daftar calon anggota DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Tim seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi menyampaikan formulir kesediaan untuk dicalonkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi kepada seluruh kader fungsionaris yang telah mengikuti Orientasi Fungsionaris baik yang diselenggarakan oleh DPP Partai Golkar atau DPD Partai Golkar Provinsi periode 2020-2025.
2. Tim seleksi dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi menetapkan Daftar Bakal Calon dalam daerah pemilihan berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan yang diterima dari fungsionaris pusat/daerah provinsi terkait, sebagaimana dimaksud dalam point (a) di atas.
3. Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada butir (b) disusun secara alfabetis dengan memperhatikan 30 % kader perempuan melalui mekanisme yang ditetapkan partai.
4. Daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana maksud pada butir (b) disusun secara alfabetis dengan memperhatikan keterwakilan kader muda.
5. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada butir (b) dikirim kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota untuk diberikan catatan dan pertimbangan.

6. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota memiliki waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima Daftar Bakal Calon dari DPD Partai Golkar Provinsi untuk mengembalikan Daftar Bakal Calon dimaksud, disertai dengan catatan/pertimbangan (bilamana ada).
7. Tim seleksi menyusun Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang diatur dalam keputusan ini.
8. Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Provinsi memberikan pertimbangan terhadap DCS yang disusun oleh Tim Seleksi.
9. Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud pada point (g) dikonsultasikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan DPP Partai Golkar.
10. Setiap calon dalam DCS diminta melengkapi persyaratan administrasi (syarat umum dan syarat khusus) dalam waktu 15 (lima belas) hari.
11. Tim seleksi melakukan verifikasi administrasi terhadap calon dalam Daftar DCS.
12. Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi diserahkan oleh DPD Partai Golkar Provinsi ke KPUD Provinsi.
13. Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan DPD Partai Golkar Provinsi setelah mendapat masukan dari KPUD Provinsi dengan sebelumnya mengkonsultasikannya kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan oleh DPP Partai Golkar.

Dalam menentukan Daftar Calon Anggota Legislatif dilakukan penilaian yang meliputi aspek:

1. Aspek Pengabdian

Aspek pengabdian adalah rekam jejak seorang kader dalam Partai Golkar yang meliputi partisipasi kader di saat menjabat sebagai pengurus partai, anggota fraksi, pengurus organisasi sayap, pengurus badan dan lembaga, pengurus ormas yang didirikan maupun yang mendirikan.

2. Aspek Elektabilitas

Aspek elektabilitas adalah peluang keterpilihan seorang kader pada suatu daerah pemilihan dilihat

dari sisi basis dukungan massa berdasarkan survei elektabilitas terbaru di daerah pemilihan.

3. Penugasan Fungsiionaris

Penugasan fungsiionaris adalah suatu bentuk penugasan yang diberikan kepada setiap fungsiionaris partai setelah kader yang bersangkutan mengikuti Orientasi Fungsiionaris. Penugasan fungsiionaris dimaksudkan agar tiap-tiap fungsiionaris Partai Golkar memberikan kontribusi aktif dalam menuntaskan konsolidasi partai (vertikal dan horizontal) memaksimalkan pelaksanaan Kaderisasi Partai, serta mendorong pelaksanaan program Karya-Kekaryaan di daerah penugasan masing-masing.

4. Aspek Pendidikan

Aspek pendidikan adalah pengalaman pendidikan seorang kader meliputi pendidikan formal, non-formal dan pendidikan kepartaian.

4.2 Tabel : Aspek Pendidikan

NO	ASPEK YANG DIBERI BOBOT	%
1	Pengabdian	40
2	Penugasan fungsiionaris	30
3	Pendidikan	30

Adapun Tata Cara Penilaian calon anggota legislatif adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian

Penilaian pengabdian didasarkan pada rekam jejak dan PD2LT serta posisi saat ini di Partai, Fraksi, Ormas Mendirikan dan Didirikan, Organisasi Sayap, Badan dan Lembaga dengan nilai 0-100.

2. Penugasan Fungsiionaris

Penilaian penugasan fungsiionaris didasarkan pada keberhasilan yang bersangkutan menuntaskan Konsolidasi Partai, memaksimalkan pelaksanaan Kaderisasi Partai, serta mendorong pelaksanaan program Karya-Kekaryaan di daerah penugasan masing-masing, dengan nilai 0-100.

3. Pendidikan

Penilaian pendidikan calon anggota legislatif didasarkan pada strata pendidikan formal dengan nilai

DPR-RI S3: 100 S2: 75 S1: 50

DPRD Prov S3: 100 S2: 75 S1: 50 D3: 25

DPRD KabKota S3: 100 S2: 80 S1: 60 D3:40 SMA: 20

Para kader yang lolos seleksi akan diumumkan melalui rapat pleno dengan sebelumnya mempertimbangkan masukan dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar dan KPUD Kalimantan Selatan.

4. Rekrutmen Calon Kepala Daerah Partai Golkar Kota Banjarmasin

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar Nomor: JUKLAK-13/DPP/Golkar/XI/2019 yaitu membahas tentang tata cara pemilihan umum kepala daerah dari Partai Golkar. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor : JUKLAK13/DPP/Golkar/XI/2019, maka dalam proses rekrutmen mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Partai Golkar, adapun dalam proses ataupun tata cara Pemilkada pertama; inventarisasi nama-nama tokoh yang dianggap layak memimpin Kota Banjarmasin. Proses ini dilakukan oleh DPD Partai Golkar kota Banjarmasin dan mengirimkannya kembali ke pusat. Kedua; tahapan survei dan seleksi. Proses ini dilakukan oleh DPP Partai Golkar Pusat sebagai langkah selanjutnya setelah menerima hasil inventarisasi dari DPD Partai Golkar. Nama-nama tokoh yang telah dipublikasi oleh DPD Partai Golkar menjadi landasan DPP Partai Golkar Pusat dalam menetapkan siapa yang dianggap layak sebagai calon kepala daerah dari Partai Golkar. Proses tersebut dibagi menjadi tahap survei awal, seleksi bakal calon internal dan tahap survei kedua. Tahap survei awal merupakan kegiatan survei secara lengkap (kualitatif dan kuantitatif) dengan sample sekurang-kurangnya 400 responden, yang dilakukan oleh lembaga survei independen yang ditunjuk oleh DPP Partai Golkar, terhadap beberapa nama tokoh yang telah dijaring tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-12 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada. Mengenai hal ini Siwan kahlikin nor mengatakan :

“Proses penjaringan diatur di JUKLAK–13/DPP/Golkar/XI/2019 Tentang Tata Cara Pemilukada Dari Partai Golkar. DPP Partai Golkar melakukan kerja sama dengan lembaga survei independen untuk melakukan survei di Kota Banjarmasin, DPD Partai Golkar tidak dilibatkan dan tidak mengetahui kapan dan dimana survei dilakukan. Maksud dari survei tersebut adalah untuk melibatkan langsung masyarakat dan pastinya hasil survei merupakan pilihan masyarakat. Hasil dari survei tersebut berasal dari inventarisasi namanama tokoh yang layak memimpin Banjarmasin dari berbagai kalangan yang dikumpulkan oleh Tim Pemilukada yang tertuang dalam surat keputusan Tim

Pemilukada DPD PG Banjarmasin No. Kep-02/GK PSP/Pemilukada/III/2020.”

Tahap seleksi bakal calon internal merupakan kegiatan pembahasan dan penentuan kader-kader Partai Golkar yang memiliki peluang besar, yang dilakukan oleh DPP Partai Golkar terhadap hasil survei awal tersebut, diseleksi dari beberapa nama kader Partai Golkar yang dinilai memiliki peluang untuk memenangkan Pemilukada di daerah tersebut, dan kemudian dipilih beberapa orang diantaranya untuk dilakukan penguatan elektabilitas. Kegiatan ini dilakukan selambat-lambatnya H-12 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

Tahap survei kedua merupakan kegiatan survei untuk evaluasi perkembangan tingkat elektabilitas para tokoh/bakal calon tersebut, dengan sample sekurang-kurangnya 400 responden, yang dilakukan oleh Lembaga Survei independen yang ditunjuk atau disetujui oleh DPP Partai Golkar, dilengkapi dengan evaluasi perkembangan peluang kader-kader Partai Golkar yang dipersiapkan tersebut sejauh mana dapat memenangkan Pemilukada. Ada kemungkinan dilakukan perubahan bakal calon yang akan diperkuat pada tahap kedua, apabila pada proses evaluasi dijumpai kemungkinan ada kader-kader Partai Golkar lain yang lebih berpeluang daripada yang dipersiapkan semula. Kegiatan tersebut dilakukan selambat-lambatnya H-8 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilukada.

Ketiga, penetapan calon kepala daerah. Selanjutnya Partai Golkar melaksanakan tahap penetapan calon, yang nantinya akan muncul calon yang secara resmi oleh Partai Golkar. Proses ini merupakan tahap akhir dimana DPP Partai Golkar akan memutuskan siapa pasangan calon yang akan menjadi calon yang mewakili Partai Golkar pada Pemilukada. Proses ini memiliki tiga tahapan penting yaitu tahap pemilihan dan penetapan calon terpilih, tahap penentuan pasangan calon dan tahap pengesahan pasangan calon.

Tahap pemilihan dan penetapan calon terpilih merupakan proses penetapan calon walikota ini dilakukan oleh Partai Golkar berdasarkan hasil Rapat Tim Pemilukada Pusat dengan pengambilan keputusan oleh 13 unsur pemegang suara. sebenarnya DPP Partai Golkar lah yang berwenang secara luas dan terpusat untuk

menentukan calon yang akan maju sebagai kepala daerah baik itu untuk tingkat gubernur maupun bupati/walikota, DPD Partai Golkar di daerah hanya berwenang untuk melakukan inventarisasi dan hasilnya direkomendasikan ke DPP untuk selanjutnya dipilih yang paling layak dan sesuai.

Tahap penentuan pasangan calon merupakan proses lanjutan untuk memilih siapa yang akan dianggap layak menjadi pasangan calon untuk dicalonkan pada Pemilu. Terdapat dua kriteria dalam penentuan pasangan calon pertama, apabila calon terpilih dari Partai Golkar adalah calon Kepala Daerah, maka akan dilakukan penetapan calon wakil kepala daerah, berdasarkan hasil kompromi antara DPP Partai Golkar dengan calon kepala daerah terpilih dari Partai Golkar. Kedua, apabila calon terpilih dari Partai Golkar adalah calon Wakil Kepala Daerah, maka akan dilakukan penetapan calon kepala daerah, berdasarkan hasil kompromi antara DPP Partai Golkar dengan calon wakil kepala daerah terpilih dari Partai Golkar. Kegiatan ini dilakukan selambat-lambatnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu.

Tahap pengesahan pasangan calon merupakan kegiatan pengesahan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPP Partai Golkar, untuk selanjutnya menjadi calon resmi yang akan diusulkan oleh Partai Golkar atau oleh Gabungan Partai Golkar dengan partai politik lain ke KPUD setempat. Kegiatan ini dilakukan selambat-lambatnya H-4 bulan sebelum hari pemungutan suara Pemilu.

Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan informan yaitu sekretaris dan bedahara DPD-PG kemudian dengan mengumpulkan data, arsip dan dokumen dari DPD-PG kota Banjarmasin, maka diperoleh informasi dan pembahasan sebagai berikut.

1. Implementasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada DPD partai Golkar kota Banjarmasin

Partai politik dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dalam setiap gerakan, kegiatan dan program partai termasuk dalam pelaksanaan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik, DPD-PG kota Banjarmasin harus mengikuti amanat Undang-Undang. Pembuatan peraturan DPD-PG juga harus

berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Fungsi rekrutmen yang dilaksanakan partai politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu rekrutmen dalam internal partai dan rekrutmen untuk mengisi jabatan politik dalam pemerintahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 29 mengatur ketentuan dari fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. anggota partai politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
- d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Rekrutmen politik yang dilaksanakan oleh DPD-PG kota Banjarmasin yaitu rekrutmen terhadap anggota baru, rekrutmen pengurus partai, rekrutmen calon anggota legislatif dan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pelaksanaan rekrutmen politik menjadi tanggung jawab partai politik untuk kelestarian partai dan mencetak pemimpin yang berkualitas. Implementasi rekrutmen anggota baru DPD-PG dilakukan dengan cara ajakan persuasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh seluruh anggota di tingkatan struktural partai. Ajakan untuk bergabung dengan DPD-PG dilakukan dengan mensosialisasikan ideologi, visi dan misi partai kepada masyarakat. Selain kader yang turun langsung ke masyarakat, DPD-PG juga mensosialisasikannya melalui media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik serta membuka web DPD-PG yang dapat diakses di <http://partaigolkar.com>. DPD-PG lebih mengutamakan kesadaran dan kesukarelaan dari masyarakat untuk menjadi anggota DPD-PG. DPD-PG kota Banjarmasin membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menjadi anggota partai. DPD-PG melakukan kaderisasi terhadap anggota dan seleksi kepemimpinan untuk memperoleh kader-kader PG yang berkualitas, sehingga apabila kader-kader partai tersebut menduduki jabatan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat bekerja dengan baik. Kader partai yang berkualitas dapat berguna untuk

perkembangan dan kelestarian partai sendiri. Semakin banyak jumlah kader yang berkualitas, partai tidak akan kesulitan ketika akan mencalonkan kadernya dalam pemilu, karena semakin banyak jumlah kader partai yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan merupakan indikator keberhasilan partai dalam fungsi rekrutmen politik. Pengurus DPD-PG kota banjrmasin berasal dari anggota DPD-PG sendiri, oleh sebab itu perlu dipersiapkan anggota-anggota yang berkualitas untuk keperluan reorganisasi kepengurusan demi perkembangan dan kualitas partai. DPD-PG telah mengupayakan perekrutan pengurus partai dengan selektif memilih orang-orang terbaik dan ahli pada bidangnya, mengingat pengurus merupakan komponen yang penting bagi partai politik.

Perekrutan pengurus partai dilaksanakan dengan seleksi individu baik secara formal maupun informal atau dengan pemilihan dalam forum resmi. Mekanisme pergantian pengurus DPD-PG kota banjrmasin dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui forum resmi yaitu MUSDA (musyawarah daerah). Cara perekrutan pengurus DPD-PG kota banjarmasin dimulai dengan memilih ketua DPD dari nama-nama calon ketua yang di usulkan oleh utusan pengurus DPD-PG partai berdasarkan hasil rapat DPD. Ketua yang terpilih berwenang menyusun kepengurusan DPD dibantu anggota formatur yang dipilih oleh utusan MUSDA. Pengurus DPD-PG kota banjarmasin merupakan pemimpin bagi anggota-anggotanya dan sebagai motor penggerak DPD-PG di wilayah Kabupaten /kota banjarmasin, sehingga pengurus partai harus memiliki sifat ideal seorang pemimpin agar kepengurusan berjalan dengan lancar dan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Herman Finer dalam Sastroadmodjo (1995:9), sifat ideal seorang pemimpin yaitu sebagai berikut: 1) kesadaran, 2) Kebulatan Pandangan, 3) ketetapan jiwa, 4) keyakinan, 5) kreativitas, 6) kepekaan hati nurani, 7) keberanian, 8) kemampuan memukau, dan 9) kepandaian.

Selain merekrut anggota baru dan pengurus partai, partai politik juga berfungsi melakukan rekrutmen terhadap anggota atau masyarakat untuk mengisi jabatan politik dalam pemerintahan melalui pemilu. Pemilihan umum dilaksanakan di negara demokrasi sebagai bentuk implementasi rotasi

kekuasaan. DPD-PG kota banjarmasin melakukan rekrutmen calon anggota legislatif dalam menghadapi pemilu legislatif 2020 dan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten Semarang dalam pemilihan pasangan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Partai politik memiliki tujuan untuk menempatkan kader partainya dalam jabatan politik yang nantinya ikut serta menjalankan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan hakikat partai politik sebagai suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi yang sama; di mana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan/mengontrol jalannya roda pemerintahan; yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-programnya yang ditetapkan. Perkembangan demokrasi dan pendidikan masyarakat, menjadikan masyarakat lebih selektif memilih caleg yang akan dipilih. Untuk itu para calon legislatif yang mewakili partai harus bisa merebut hati masyarakat agar mendapatkan dukungan dalam pemilu legislatif. Pemilu legislatif merupakan kesempatan bagi partai untuk memperjuangkan kader-kader terpilihnya untuk mendapatkan jabatan di lembaga perwakilan yaitu DPR dan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Implementasi rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPD-PG dilakukan terhadap anggota partai yang memenuhi syarat. Selain itu, masyarakat di luar partai bisa direkrut apabila memenuhi syarat dan menyetujui perjanjian politik dengan DPD-PG. Hal ini dapat digunakan partai untuk merekrut anggota baru, karena salah satu syarat bagi masyarakat yang bisa dijaring oleh partai harus bisa menunjukkan bukti Kartu Tanda Anggota (KTA). Bagi partai yang memiliki banyak kader berkualitas tidak terlalu sulit dalam menentukan nama-nama yang akan dijaring dan disaring sebagai calon pemimpin. Lain halnya jika partai tidak memiliki banyak kader pilihan, maka harus merekrut calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dari eksternal partai.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik DPD-PG kota Banjarmasin

Keberhasilan partai tidak terlepas dari kerjasama seluruh komponen dalam partai politik baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Faktor pendukung sehingga DPD-PG dapat melaksanakan fungsinya dalam merekrut anggota, pengurus DPD, calon legislatif dalam pemilihan legislatif 2020 dan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang dalam Pemilu 2020 antara lain didukung adanya pengorganisasian yang solid dalam tubuh partai. Struktur organisasi yang kokoh hingga ke tingkat dusun atau Rukun Warga (RW) memudahkan kader untuk terlibat langsung dengan masyarakat. Kader DPD-PG di tingkat ranting dan anak ranting akan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat karena lingkup tidak terlalu luas. DPD-PG provinsi dapat berkoordinasi dengan DPD kota Banjarmasin, pimpinan kecamatan dan pimpinan desa tentang perkembangan DPD-PG di masing-masing wilayah. Basis DPD-PG yang nasionalis sesuai dengan kondisi sebagian besar masyarakat kota Banjarmasin yang berbasis nasionalis, sehingga memudahkan partai dalam menyampaikan ideologi, visi dan misi partai ke masyarakat. Visi dan misi partai serta program kerja partai akan lebih mudah diterima masyarakat karena sesuai dengan keinginan masyarakat kota Banjarmasin yang sebagian besar berbasis nasionalis. Kemenangan-kemenangan DPD-PG pada Pemilu di tingkat kota Banjarmasin menjadi salah satu pendukung partai dalam rekrutmen politik, dengan kemenangan PDP-PG maka para individu yang berkeinginan untuk menjadi anggota DPRD, bupati/wakil bupati serta jabatan lainnya tertarik masuk keanggotaan DPD-PG. Meskipun sering kali motivasi utamanya hanya menggunakan DPD-PG sebagai kendaraan politik dalam memperoleh kekuasaan saja. Masyarakat menjadi anggota DPD-PG juga terdorong oleh kekaguman masyarakat terhadap figur Soeharto dan Suhardiman merupakan satu-satunya pendiri partai Golkar yang masih hidup kala itu, beliau meninggal pada tahun 2015 yang lalu, kedua figur ini menjadi bagian yang tidak terlepas dari eksistensi DPD-PG. Bukan tidak mungkin tokoh-tokoh lain dari DPD-PG yang dikagumi oleh masyarakat sehingga mereka tertarik masuk keanggotaan DPD-PG, Keaktifan kader PG juga

berpengaruh terhadap rekrutmen anggota baru PG, kalau kader aktif maka anggota yang direkrut juga semakin meningkat. Selain keaktifan kader PG, perilaku baik kader PG di masyarakat juga mendukung antusias masyarakat masuk menjadi anggota PG.

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Rekrutmen Politik Partai Golkar Kota Banjarmasin

Proses pelaksanaan rekrutmen politik yang dilakukan oleh PG kota Banjarmasin tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan partai dan masyarakat, hal ini dikarenakan terdapat hambatan-hambatan sehingga membuat hasilnya kurang maksimal. Hambatan tersebut antara lain karena adanya anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik. Dewasa ini masyarakat menilai partai politik mulai mementingkan kepentingan partainya saja ketika kader partai berhasil menduduki jabatan politik di pemerintahan. Program-program kerja yang dibuat oleh partai politik jarang yang bisa terealisasi secara riil di masyarakat. Anggota legislatif dan eksekutif yang diusung partai politik banyak yang kurang mampu menerapkan ideologi sebagai program kerja yang memberikan manfaat secara nyata kepada masyarakat. Hambatan yang lain adalah pandangan masyarakat terhadap PG sendiri sebagai partainya kaum elit, hanya orang tertentu saja yang menduduki kursi jabatan padahal tidak selamanya pandangan masyarakat itu benar. PG memiliki banyak kader yang baik, yang berhasil menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Tapi memang tidak semua anggota dan kader PG berkualitas baik. SDM PG yang belum seluruhnya berkualitas yang salah satunya disebabkan macetnya kaderisasi oleh DPD-PG juga menjadi hambatan dalam implementasi rekrutmen politik, banyaknya kader dari PG yang duduk di kursi legislatif tanpa proses pengkaderan. Perkembangan demokrasi di Indonesia membuat berkembangnya partai politik sangat pesat. Hambatan lain dari implementasi rekrutmen politik PG adalah persaingan dengan partai politik lain yang semakin banyak sehingga masyarakat kebingungan menentukan pilihan mereka. Persaingan dengan partai politik terjadi untuk memperebutkan dukungan dan orang-orang terbaik untuk masuk ke dalam partainya. Kadang kala persaingan tidak sehat sering menjadi

fenomena dalam memperebutkan orang-orang yang dipandang bisa menguntungkan partainya. Jika semua faktor dapat terpenuhi tetapi faktor dana masih kurang, akan menjadi hambatan juga dalam implementasi rekrutmen politik. Dana diibaratkan sebagai bahan bakar mobil, tidak bisa berjalan apabila bahan bakar telah habis. Dana diperlukan untuk pelaksanaan program partai, melakukan sosialisasi di masyarakat dan biaya operasional lainnya dalam implementasi rekrutmen politik PDI Perjuangan. Kurangnya dana yang ada, membuat agenda dan program partai tidak terlaksana secara keseluruhan. PG mengupayakan penguatan infrastruktur salah satunya dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya keuangan agar ada alokasi dana untuk keperluan rekrutmen politik. PG dalam upaya mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik memprioritaskan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dengan tidak mencemari citra partai politik dengan melakukan tindakan seperti korupsi, pelecehan seksual, narkoba dan psikotropika oleh anggota partai apalagi kader partai yang menduduki jabatan strategis pada lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Bahkan sebagai kader PG yang telah diperjuangkan dan terpilih menjadi wakil dan pemimpin rakyat, harus dapat menjadi figur wakil dan pemimpin yang baik bagi rakyatnya. PG mengupayakan untuk mengoptimalkan kembali kaderisasi secara intensif 3 (tiga) bulan sekali yang mencakup semua anggota partai diseluruh jenjang struktural PG, dengan harapan supaya kader yang berkualitas akan lebih banyak didapatkan oleh PG. Materi pengkaderan disesuaikan dengan penempatan kader partai. Banyaknya kader berkualitas dalam PG dapat merekrut anggota lebih maksimal, serta memudahkan partai dalam reorganisasi pengurus dan memudahkan partai dalam pelaksanaan penjangkaran calon anggota legislatif menjelang Pileg atau penjangkaran calon kepala daerah/wakil kepala daerah menjelang Pilkada.

5. KESIMPULAN

- a. Partai Golkar bertanggung jawab mengajukan kader yang terbaik untuk dipilih sebagai anggota legislatif. Untuk memperlancar proses penentuan kader terbaik tersebut, maka

pelaksanaan rekrutmen calon legislatif oleh Partai Golkar melalui tahap penjangkaran, penyaringan dan penetapan. Rekrutmen pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Banjarmasin dalam Pilkada 2020 dilakukan terhadap anggota partai yang memenuhi syarat. Selain itu, masyarakat di luar partai bisa direkrut apabila memenuhi syarat dan menyetujui perjanjian politik dengan melalui tahap-tahap seleksi pemilu PG kota Banjarmasin, melaksanakan kaderisasi untuk meningkatkan SDM partai, menyiapkan kader partai yang berkualitas yang akan memudahkan dalam perekrutan calon pemimpin yang mana bentuk kegiatannya berupa sharing, Kursus Guru Kader, seminar, dan outbond, studi banding, pelatihan dan penyegaran.

- b. Faktor pendukung pelaksanaan rekrutmen politik PG adalah: kondisi masyarakat kota Banjarmasin yang berbasis nasionalis sesuai basis PG, pengorganisasian partai yang solid sampai pimpinan desa (PD), organisasi sayap PG yang direkrut dari berbagai kalangan masyarakat, kemenangan PG dalam beberapa pemilu, keaktifan kader dan perilaku kader di masyarakat, dan kekaguman masyarakat terhadap figur Soeharto dan Suhardiman. Faktor penghambat pelaksanaan rekrutmen politik PG adalah: dana, SDM anggota partai, anggapan negatif masyarakat terhadap partai politik, citra PG yang banyak di isi oleh kaum pemodal tanpa kaderisasi, dan PG program kerja partai yang jarang ada realisasinya secara riil.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Mengingat pentingnya kaderisasi, maka PG perlu mengoptimalkan kembali kaderisasi. Kaderisasi hendaknya dilakukan secara terus menerus dan mencakup seluruh anggota partai agar partai dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) partai sehingga memudahkan partai untuk keperluan

- reorganisasi pengurus partai dan penjurangan calon legislatif dan calon kepala daerah.
2. Perlu dikembangkan sistem yang demokratis dalam tubuh PG, mengingat selama ini semua keputusan partai dimobilisasi oleh DPP dan tingkatan struktural di bawah hanya mengikuti apa yang diinstruksikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Prof. Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Tahun 2020-2025. Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) DPP Partai Golongan Karya Tahun 2020-2025 Tentang Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya.

Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) Dpp Partai Golongan Karya Tahun 2020-2025 Tentang Musyawarah-Musyawah Dan Rapat-Rapat Partai Golongan Karya Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perubahan Juklak-4/DPP/Golkar/XII/2015 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah-Musyawah Partai Golongan Karya Di Daerah

Petunjuk Pelaksanaan (jutlak) DPP Partai Golongan Karya Tahun 2020-2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Dari Partai Golongan Karya Perubahan Atas Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak-6/DPP/Golkar/VI/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dari Partai Golkar.

Petunjuk Pelaksanaan (jutlak) Partai Golongan Karya Tahun 2020-2025 Tentang Tata Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan Atau Sebutan Lain Dan Perwakilan Luar Negeri Partai Golongan Karya.

Petunjuk Pelaksanaan (jutlak) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Tahun

2020-2025 Tentang Administrasi Keanggotaan Dan Kartu Tanda Anggota Partai Golkar.

DR. Muhammad, S,H., M.Ed. 2020. *Benalu di pohon Beringin*. Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri Kayu Tangi Banjarmasin

Haris, Syamsuddin Dan Ikrar Nusa Bhakti. 2016. *Panduan Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi

Litbang Kompas. 2004. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Buku Kompas

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rush, Michael & Phillip, Althoff. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik. (diterjemahkan dari judul aslinya Introduction to Political Sociology oleh Kartini Kartono)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ketujuh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Riadi, Ahmad. 2020. *Rekrutmen Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019*. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah.

Anggaraini, Titi. 2019. *Jurnal Pemilu & Demokrasi (Demokratisasi Rekrutmen Partai Politik)*. Jakarta Selatan: Yayasan Perludem (perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi)

Soetomo. 2007. *Perilaku Organisasi dan Rekrutmen Politik*. Jakarta: Prenada

Rush, Michel dan Philips Althoff. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Vigana, Cendhy Vicky. 2019. *Partai Politik Dan Rekrutmen Politik (Studi Atas*

Rekrutmen Koalisi Partai Golkar Dan PPP Dalam Mengusung Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Czudnowski. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Lexy J, Moelong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Muthalib, Muh Reza Abd. 2016. Rekrutmen Politik Partai Golkar Dalam Penetapan Calon Bupati Gowa Periode 2015-2020. *Skripsi*. Makassar: UIN Alaudin.

Putra, Fadillah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baalwy, Noor Asty. 2012. Rekrutmen Politik Partai Nasional Demokrat Dalam Proses Institusional Partai di Kota Makassar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin